

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang merupakan badan pemerintah daerah Kabupaten Batang yang berada dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Batang baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari pendapatan lainnya yang ada di Kabupaten Batang. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang.

3.2 Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram dan Sejahtera.”

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan tata kelola pemerintahan berbasis *Smart City* yang didukung pengembangan kerjasama.

2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya dengan optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan kerukunan bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamatan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

3.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

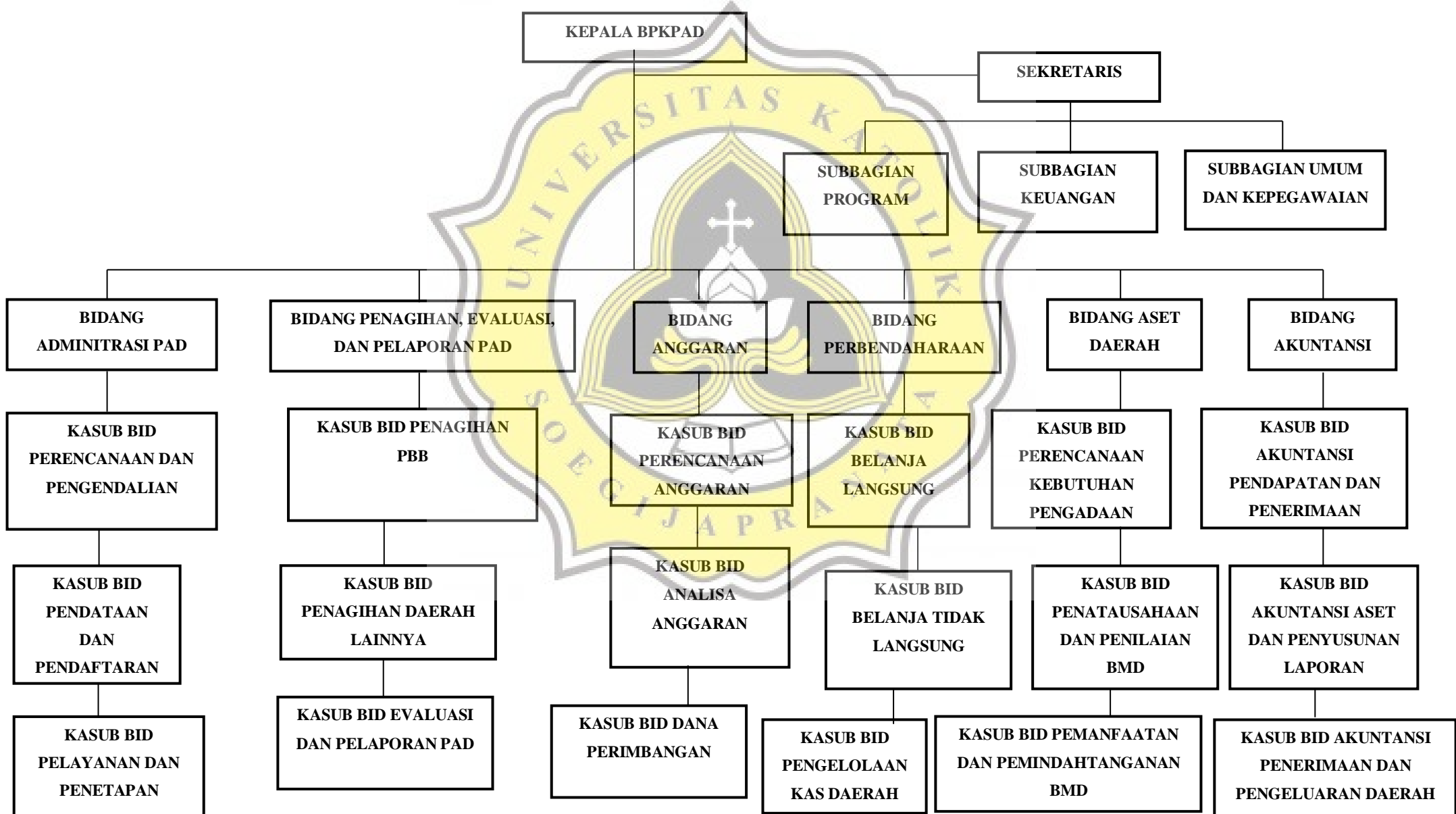
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang memiliki susunan organisasi yang berguna untuk mengatur pendapatan di Kabupaten Batang agar tujuan yang ditargetkan dan diharapkan berjalan dengan baik sesuai tanggung jawab masing-masing. Susunan organisasi dan tata kerja pangkat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang yaitu sebagai berikut :

1. Kepala BPKPAD
2. Sekretariat
3. Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah
4. Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD
5. Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan

6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
7. Bidang Aset Daerah
8. Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan



Gambar 3.1 BAGAN ORGANISASI BPKPAD KABUPATEN BATANG



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2018

3.4 Tugas Pokok Dari Masing-Masing Bidang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

1. Kepala BPKPAD

Tugas pokok Kepala BPKPAD melakukan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan teknis pada bidang keuangan daerah di Kabupaten Batang, menyelenggarakan, membina dan bertanggungjawab terkait pelaksanaan tugas di bidang keuangan daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas pokok mengkoordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program kerja, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, dan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah

Tugas pokok yang dilaksanakan oleh bidang ini yaitu melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasi, menyelenggarakan evaluasi serta melaporkan kegiatan terkait pengelolaan administrasi PAD. Tugas-tugas tersebut diantaranya seperti merumuskan kebijakan pendaftaran, pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah, menghitung serta menetapkan pajak dan retribusi daerah, menerbitkan surat-surat terkait

pajak dan retribusi daerah, melaksanakan pelayanan permohonan keberatan pajak dan retribusi daerah.

4. Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD

Bidang ini memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dari Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah. Selain itu bidang ini juga membina, mengembangkan, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan seperti penagihan PBB Perkotaan dan Perdesaan, pajak daerah lainnya, dan pendapatan asli daerah.

5. Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan

Memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan pada kegiatan di bidang anggaran dan dana perimbangan, merencanakan, menyusun, menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan analisa anggaran dan dana perimbangan.

6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan belanja langsung, belanja tidak langsung serta mengelola kas daerah.

7. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dengan menyelenggarakan kegiatan penatausahaan, pemanfaatan, penilaian, dan pemindahtanganan

barang milik daerah. Selain itu bidang ini juga mengadakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.

8. Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan

Memiliki tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan akuntansi pendapatan dan penerimaan daerah, kegiatan akuntansi aset, menyusun laporan keuangan daerah, memantau dan melaporkan akuntansi belanja dan pengeluaran daerah.

(sumber : bpkpad.batangkab.go.id)

3.5 Metode Penelitian

3.5.1 Objek, Lokasi, dan Sampel

Peneliti mengambil objek pajak dalam penelitian ini yaitu pajak restoran di Kabupaten Batang. Tempat peneliti melakukan penelitian yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 18 Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data wajib pajak restoran, data target dan realisasi pajak restoran Kabupaten Batang tahun 2017-2019, serta data target dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017-2019.

3.5.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

a) Data Primer

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai atau petugas BPKPAD Kabupaten Batang. Dalam penulisan ini data primer yang diperoleh yaitu mengenai penggunaan, pemanfaatan, kendala dan dampak dari penyalahgunaan Tapping Box oleh wajib pajak restoran sehingga berdampak pada penerimaan pajak restoran di Kabupaten Batang, proses penetapan target dan realisasi yang dicapai, dan upaya-upaya yang dilakukan BPKPAD agar target pajak restoran di Kabupaten Batang tercapai.

b) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang telah diolah. Data sekunder yang diperoleh yaitu struktur organisasi BPKPAD, data target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran mulai tahun 2017 hingga tahun 2019. Data target dan realisasi tersebut diperoleh dari arsip-arsip BPKPAD Kabupaten Batang.

3.5.3 Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan metode kuantitatif deskriptif dan metode kualitatif deskriptif. Metode kuantitatif deskriptif menekan pada data berupa angka, yaitu untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun anggaran 2017 hingga tahun 2019 dengan menggunakan rumus perhitungan dan berbagai teori pendukung agar diperoleh kesimpulan atas hasil hitung. Sedangkan metode kualitatif deskriptif yaitu untuk

mengetahui penggunaan, pemanfaatan, kendala dan dampak dari penyalahgunaan *Tapping Box* oleh wajib pajak restoran sehingga berdampak pada penerimaan pajak restoran di Kabupaten Batang. Juga untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama pajak restoran.

